

LAPORAN
MONITORING, EVALUASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
TRIWULAN II
TAHUN 2023



DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan II Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai pelaksanaan PPID serta evaluasi terhadap kinerja PPID dalam menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan ke depan.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Laporan Monev Triwulan II Poltekkes Kemenkes Denpasar di masa mendatang.

Akhirnya semoga Laporan Monev ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Denpasar, 19 Juni 2023

Ketua PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar



Ida Bagus Putu Putra Kencana, SST., M.Kes NIP.

1910111199031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan.

Poltekkes Kemenkes Denpasar sebagai salah satu badan publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien, Poltekkes Kemenkes Denpasar telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, menyediakan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pelayanan informasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan telah berjalan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID perlu dilakukan secara periodic

Monitoring dan evaluasi pada Triwulan II ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pelayanan informasi publik setelah Triwulan I, sekaligus sebagai upaya untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan II meliputi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Kegiatan ini mencakup pemantauan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi, kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat.

Selain itu, monitoring dan evaluasi juga mencakup identifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi PPID pada Triwulan II adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar selama periode April sampai dengan Juni 2023. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memantau kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Monitoring dan evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pelayanan informasi publik serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

D. Manfaat

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPID pada Triwulan II memberikan manfaat sebagai sarana untuk menilai efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Melalui kegiatan ini, pengelola PPID dapat mengetahui sejauh mana pelayanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga memberikan gambaran mengenai kondisi sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan pelayanan informasi publik. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

Dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkala, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan akses informasi yang lebih mudah, cepat, dan transparan kepada masyarakat.

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Prasarana dan Sarana

PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar telah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat. Fasilitas tersebut digunakan untuk memastikan proses pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Beberapa sarana dan prasarana yang tersedia antara lain front desk yang berfungsi sebagai tempat konsultasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi. Selain itu, tersedia ruangan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan informasi dan konsultasi permohonan informasi.

Dalam mendukung kegiatan pelayanan informasi, PPID juga dilengkapi dengan berbagai peralatan pendukung seperti komputer, printer, scanner, serta akses jaringan internet yang digunakan dalam pengelolaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah petugas PPID yang menangani pelayanan informasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada tahun 2023 sebanyak **15 orang**. Tim PPID terdiri dari beberapa unsur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pelayanan informasi publik.

Petugas tersebut meliputi pengelola informasi, petugas administrasi, serta tim teknis yang membantu dalam pengelolaan dan pemeliharaan informasi serta dokumentasi yang diperlukan dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

3. Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Triwulan II tahun 2023, Poltekkes Kemenkes Denpasar masih menghadapi keterbatasan anggaran. Keterbatasan tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan sistem atau aplikasi PPID yang dapat mendukung pelayanan informasi secara lebih optimal.

4. Permohonan Informasi

Selama periode April sampai dengan Juni 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar belum menerima permohonan informasi dari masyarakat yang memerlukan akses data atau informasi terkait kegiatan dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar.

BAB III

MONITORING PELAKSANAAN PPID

1. Statistik Permohonan Informasi

Berikut statistik permohonan informasi pada Triwulan II tahun 2023:

Bulan	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Waktu Pemenuhan
April	0	0	0	0 hari
Mei	0	0	0	0 hari
Juni	0	0	0	0 hari

2. Penyelesaian Permohonan Informasi

Selama Triwulan II tahun 2023, PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar belum menerima permohonan informasi dari masyarakat, sehingga tidak terdapat proses penyelesaian permohonan informasi pada periode ini.

3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPID pada Triwulan II antara lain:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi public.
- b. Keterbatasan dukungan anggaran, terutama untuk pengembangan sistem atau website PPID yang dapat mendukung pelayanan informasi secara lebih optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar pada Triwulan II tahun 2023 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Selama periode April sampai dengan Juni 2023 belum terdapat permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat kepada PPID Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- c. Pelaksanaan pelayanan informasi masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta dukungan anggaran dalam pengembangan sarana dan prasarana pelayanan informasi.

2. Saran

- a. Meningkatkan dukungan anggaran untuk memperbaiki dan mengembangkan sarana serta prasarana pelayanan informasi publik.
- b. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkala agar petugas PPID lebih siap dalam menangani permohonan informasi publik.
- c. Melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai mekanisme pengajuan permohonan informasi publik melalui berbagai media komunikasi.